

## PETISI MASYARAKAT SIPIL

### **"HENTIKAN REMILITERISASI: MILITERISASI SIPIL MENGANCAM DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM"**

Dinamika demokrasi dan kebebasan di Indonesia akhir-akhir ini terancam akibat peran militer yang masuk jauh ke dalam kehidupan sosial politik kita. Militer tidak lagi hanya menjalankan fungsi pertahanan, tapi juga terlibat terlalu jauh dan berlebihan dalam fungsi-fungsi non pertahanan. Rezim pemerintahan ini telah mempolitikasi militer untuk kepentingan-kepentingan pragmatis kekuasaan dan kepentingan-kepentingan proyek rezim, seperti melibatkan militer dalam program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, menangani kriminalitas, mengamankan demonstrasi mahasiswa, pengamanan proyek strategis nasional, dan lain sebagainya.

Kami menilai pelibatan militer dalam fungsi non pertahanan bertentangan dengan konstitusi. Tugas dan fungsi militer dalam konstitusi adalah sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai alat pembangunan, apalagi menjadi aparat penegak hukum. Militer sejatinya dilatih dan dididik untuk perang, dan bukan untuk menjalankan kepentingan politik ekonomi kekuasaan. Pelibatan militer dalam fungsi non pertahanan yang tidak proporsional akan berdampak serius pada melemahnya profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara.

Kami memandang militerisasi sipil telah berdampak signifikan terhadap terjadinya kekerasan terhadap warga sipil. Meninggalnya 5 orang peserta pelatihan Koperasi Desa Merah Putih adalah bukti nyata efek negatif militerisasi ruang sipil. Padahal seharusnya kekuasaan tidak perlu mengagendakan pelatihan dasar kemiliteran dalam program tersebut, karena yang dibutuhkan adalah pelatihan manajemen, marketing, akuntansi, dan antikorupsi (anti-fraud).

Lebih dari itu pengelolaan ratusan MBG oleh TNI adalah sebuah kesalahan, karena tidak sesuai dengan kompetensi, tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Hingga 23 Oktober 2025, sedikitnya 452 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikelola TNI di berbagai daerah. Keterlibatan militer ini menunjukkan terjadinya politisasi militer oleh kekuasaan untuk mensukseskan proyek-proyek pemerintah.

Kami menilai proses remiliterisasi telah berdampak pada terjadinya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Ketika militer terus dilibatkan dalam urusan sipil, kekerasan menjadi konsekuensi yang semakin sulit dihindari. Data KontraS menunjukkan, sepanjang Januari hingga April 2026, terjadi 44 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota TNI, dengan 33 korban warga sipil; 36 orang terluka dan 22 orang lainnya tewas. Bahkan, pasca revisi UU TNI, peristiwa kekerasan justru meningkat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meluasnya peran militer tidak menghadirkan rasa aman, melainkan memperbesar ruang intimidasi dan ketakutan di tengah masyarakat.

Kami memandang kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus menjadi potret buram demokrasi di tengah menguatnya militerisasi. Serangan tersebut adalah bukti nyata terorisme negara yang ingin menciptakan terror dan membangun politik ketakutan kepada masyarakat, dengan menyalahgunakan instrumen kekuatan intelijen militer (BAIS).

Ironisnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta hanya menjatuhkan hukuman maksimal 3,5 tahun kepada para pelaku penyiraman air keras, sementara dua di antaranya bahkan tidak dipecat dari dinas militer. Lebih buruk lagi, percobaan pembunuhan tersebut justru direduksi sebagai sekadar "balas dendam pribadi", sehingga mengaburkan dugaan adanya aktor intelektual dan membebaskan institusi dari pertanggungjawaban. Apa yang terjadi pada proses peradilan yang menimpa Andrie Yunus, kembali menelanjangi bobroknya sistem peradilan militer di Indonesia.

Lebih lanjut, kami juga menilai pembentukan 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang disampaikan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan perluasan komando teritorial berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi militer. Selain itu, juga akan semakin mempersempit ruang kebebasan sipil, memperbesar risiko pelanggaran hak asasi manusia, memicu konflik lahan dan ruang hidup, serta mengaburkan batas antara urusan pertahanan negara dan urusan pemerintahan sipil. Ekspansi BTP dan komando teritorial yang berorientasi pembangunan justru menjauhkan TNI dari mandat profesionalnya sebagai alat pertahanan negara. Ekspansi teritorial itu tidak sejalan dengan UU TNI, khususnya berkaitan dengan gelar dan postur TNI yang diatur dalam Pasal 11 UU TNI. Ketentuan ini menegaskan bahwa postur dan gelar kekuatan TNI tidak boleh mengikuti struktur administrasi pemerintahan sipil, serta tidak boleh berpolitik praktis.

Perluasan BTP dan komando teritorial justru berisiko menghidupkan kembali infrastruktur dwifungsi militer, yang pada masa lalu menjadi penopang sekaligus alat kontrol politik kekuasaan. Selain juga berdampak pada pemberangusan kebebasan sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Lebih dari itu, dalam konteks konflik agraria dan pembangunan proyek strategis, pelibatan struktur teritorial militer juga berisiko memperbesar intimidasi, kriminalisasi, pengusuran paksa, pembatasan akses informasi, serta kekerasan terhadap warga yang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya. Pembangunan BTP dan Koter justru akan menjadi hambatan serius dalam peningkatan kesejahteraan prajurit dan pembangunan alutsista yang modern dan pembangunan tentara yang profesional.

Merespons kondisi dan dinamika tersebut, kami para akademisi, intelektual, aktivis organisasi masyarakat sipil, jurnalis, dan berbagai elemen sipil, mendesak kepada:

1. Pemerintah, untuk menghentikan program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) serta menghentikan bentuk-bentuk pelatihan militer yang diperuntukkan bagi masyarakat sipil;
2. Pemerintah, untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang melibatkan TNI dalam ranah-ranah sipil, serta mengembalikan peran dan fungsi TNI sebagai institusi profesional yang fokus pada pertahanan Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah dan DPR-RI, untuk segera merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer guna memastikan seluruh prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diproses melalui peradilan umum sesuai dengan mandat TAP MPR No. VII tahun 2000;
4. Pemerintah dan DPR-RI, untuk menghentikan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan dan perluasan komando teritorial karena tidak sejalan dengan mandat UU TNI dan semangat reformasi TNI.

Jakarta, 29 Juli 2026

Hormat Kami,

**A. ORGANISASI:**

1. Imparsial
2. KontraS
3. YLBHI
4. Indonesia RISK Centre
5. Amnesty International Indonesia
6. Human Right Working Group (HRWG)
7. WALHI
8. Centra Initiative
9. Raksha Initiatives
10. DeJure
11. ICW
12. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
13. SETARA Institute
14. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
15. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat
16. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang
17. Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
18. Public Virtue
19. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
20. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
21. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
22. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK)
23. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
24. LBH Medan
25. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
26. Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)
27. Aceh Green Conservation
28. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
29. Institut KAPAL Perempuan
30. JAMAN (Jaringan Kemandirian Nasional)
31. Kolektif Merpati
32. Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI)
33. Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan (KOMPAK)
34. Komunitas FAJARU Maluku Utara
35. LBH Bandung
36. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua
37. Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2)
38. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
39. NocturNO
40. Perhimpunan BAKUMSU
41. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN)

42. PPKS Kalbar
43. Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM
44. SEPAKAT
45. Social Movement Institute
46. Teater Gandrik
47. TOLAK
48. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
49. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)
50. Yayasan YAPHI
51. Asosiasi LBH APIK Indonesia
52. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM)
53. Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UNIMED
54. Suara Ibu Indonesia
55. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
56. Serikat Pekerja Kampus
57. Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD)
58. Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)

## **B. INDIVIDU**

1. Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., L.L.M (Akademisi)
2. Prof. (Ris.) Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Pengamat Politik dan Demokrasi)
3. Prof. Dr. Ani Soetjipto (Akademisi)
4. Prof. Dr. Ali Safa'at, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
5. Prof. Dr. Saiful Mujani, M.A., M.Sc. (Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
6. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. (Pemerhati Hukum dan Hak Asasi Manusia)
7. Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.xA. (Periset Tata Kelola dan Konflik)
8. Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si. (Pusat Studi Agama dan Demokrasi - PSAD) UII
9. Prof. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H (Akademisi)
10. Dr. Muhammad A. S. Hikam, M.A., A.P.U. (Akademisi)
11. Dr. Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (STHI Jentera)
12. Dr. Al Araf, S.H., M.Si. (Akademisi)
13. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. (Akademisi)
14. Dr. Milda Istiqomah, S.H., M.Kn. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
15. Dr. Ubedilah Badrun, M.Si. (Akademisi Universitas Negeri Jakarta)
16. Dr. Yanuar Nugroho (STF Driyarkara Jakarta)

17. Dr. Tri Agus Susanto (Akademisi STPMD APMD Yogyakarta)
18. Dr. Bernarda Meteray (Akademisi)
19. Dr. Herdiansyah Hamzah S.H., LL.M (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik)
20. Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M. (Akademisi)
21. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. (Akademisi FH UGM, Ketua PANDEKHA)
22. Sukidi, Ph.D. (Pemikir Kebhinekaan)
23. Okky Madasari, Ph.D (Sastrawan dan Sosiolog)
24. Dr. Dhia Al Uyun (Serikat Pekerja Kampus - SPK)
25. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D (Akademisi FH Unair)
26. Feri Amsari, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas)
27. Fauzin, S.H., LL.M. (Akademisi Universitas Trunojoyo Madura)
28. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum (Peneliti/ Ketua LAB-45)
29. Halida Hatta (Pegiat Demokrasi)
30. Butet Kartaredjasa (Budayawan, Teater Gandrik)
31. Suciwati (Aktivis HAM)
32. Nursyahbani Katjasungkana (Aktivis HAM Perempuan)
33. Sandra Moniaga (Aktivis HAM)
34. Usman Hamid (Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia)
35. Ray Rangkuti (Lingkar Madani)
36. Hamid Basyaib (Aktivis Demokrasi)
37. Beka Ulung Hapsara (Aktivis HAM)
38. Mangadar Situmorang, Ph.D (Akademisi)
39. Kristian Widya Wicaksono, Ph.D (Akademisi)
40. Aisyah Putri Budiatri, Ph.D (Peneliti BRIN)
41. Muhamad Haripin, Ph.D (Peneliti BRIN)
42. Gustika Fardani Jusuf (Aktivis Perempuan)
43. Saidiman Ahmad (SMRC)
44. Julius Ibrani (Indonesia RISK Centre)
45. Boy Jerry Even Sembiring (Direktur Eksekutif Nasional WALHI)
46. Asep Komarudin (Greenpeace Indonesia)
47. Bhatara Ibnu Reza (DE JURE)
48. Islah Bahrawi (Pegiat Demokrasi Indonesia)
49. Ardi Manto Adiputra (Imparsial)
50. Dian Purnomo (Save the Children Indonesia)
51. Sri Palupi (The Institute for Ecosoc Rights)
52. Zumrotin (YLKI)
53. Listyowati (Kalyanamitra)
54. Pipit Aidul Fitriyana (MAARIF Institute)
55. Ahmad Mustafad Vauzi (ELSAM)
56. Albert Wirya (LBH Masyarakat)
57. Rizky Argama (PSHK)
58. Andi Muttaqien (Satya Bumi)
59. Franky Samperante (Yayasan Pusaka Bentala Rakyat)

60. Armayanti Sanusi (Solidaritas Perempuan)
61. Ali Wardhana Isha (The Ihakkie Foundation/Havara Institute)
62. Isro Wahyudi (Aktivis Buruh)
63. Kahar Muamalsyah (PBHI)
64. Haidar Mahameru Hikmatiar (PBHI & Argajaladri)
65. Fadhil Alfathan (LBH Jakarta)
66. Said Niam (LBH APIK Jakarta)
67. Habibus Shalihin (YLBHI–LBH Surabaya)
68. Irvan Saputra (LBH Medan)
69. Fandi Ahmad Chairuddin (PBHI Jawa Tengah)
70. Paoina Bara Pa (Amnesty International Indonesia)
71. Ika Ardina (Suara Ibu Indonesia)
72. Mohamad Miqdad (Paritas Institute)
73. Latifah Anum Siregar (Aliansi Damai Papua - AIDP)
74. M. Daffa Athalla Batubara (Lokataru Foundation)
75. Rakhmad Zailani Kiki (Lembaga Peradaban Luhur/LPL)
76. Torry Kuswardono (Yayasan Pikul)
77. Siti Khoirun Ni'mah (INFID)
78. Muhammad Mukhlisin (Yayasan Cahaya Guru)
79. Vera Soewirya (KITA Indonesia)
80. Erniliana (Dayakologi)
81. Anwar Syueb (Founder Bina Damai Indonesia)
82. Amin Siahaan (Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia/JKLPK)
83. Agus Sutomo (Lembaga Teraju Indonesia)
84. Ahmad Zaki (Ketua Umum Solidaritas Masyarakat untuk Keadilan/SMUK)
85. Andi Syafrani (Presiden DPP Lumbung Informasi Rakyat/LIRA)
86. Wakil Kamal (Aktivis 1998)
87. Ismail Adnan (Aktivis HAM)
88. Fridolin Berek (Aktivis HAM)
89. Azas Tigor Nainggolan (FAKTA Indonesia)
90. Bara Arul (AJI Makassar)
91. Djemi Amnifu (AJI Kupang)
92. Christ Belseran (titastory.id)
93. Aprilian Cena (Institute for Diplomacy, Economic, Peace, and Thought/INDEPTH)
94. Arfi Bastian Kamil (Pusat Pengembangan Kreativitas Masyarakat)
95. Ashraf Bayu Saputra (Direktur Kolong Pergerakan Kabupaten Kepulauan Selayar)
96. Fahri Hamzah Siregar (LKBHMI Cabang Ciputat)
97. Fanolo Ndraha (Persatuan Masyarakat Nias)
98. Joni Budi Utomo (JAMAN Jember)
99. M. Taufik (Perserikatan Petani Sulawesi Selatan)
100. Mike Verawati (MBG Watch)

101. Mimi Surbakti (Yayasan Srikandi Lestari)
102. Miryam Nainggolan (Aktivis Organisasi Masyarakat Sipil)
103. Muhamad Juaini (Gema Alam NTB)
104. Muhammad Ikbar Nariswara (LP3ES)
105. Muhammad Mutsaqqif (FORMACI)
106. Musliha Rofik (Rumah Sahabat Perempuan)
107. Nafi'atul Ummah (FORMACI)
108. Nila Wardani (Ruang Mitra Perempuan Indonesia)
109. Padus (GITAKU)
110. Pepri Purba (Perantau Dairi)
111. Petrus Baru (PPMAN)
112. Widodo Dwi Putro (akademisi)
113. Ryan Andriyana Putra (Forum Kewaspadaan Dini Daerah)
114. Slame Raharjo (Inclusive Legal Center)
115. Dr. H. Repulis Ruswy, S.H., M.H. (Borobudur Law Firm)
116. Wawan Setiawan (Purnawirawan Polri, Garut)
117. Wira Tri Ananda Manalu (LBH Pekanbaru)
118. Yahya (Tokoh Masyarakat Cirebon Timur)
119. Firdaus Canyadi (IPB University)
120. Alif Iman Nurlambang (STF Driyarkara)
121. David Gensada Mathist (SEMA Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
122. Muhammad Dzikri Sulaeman (BEM FH UPN Veteran Jakarta)
123. Nayla Amanda (UIN Jakarta)
124. Nena Hutahaeen (TAUD)
125. Muhammad Tabrani Mutalib (Yayasan Lembaga Pengkajian dan Advokasi Independen)
126. Darmaningtyas (Peneliti)
127. Praditiyo Ikhrum (Indonesia Education Watch)
128. Tyo Ardianto (Aktivis Mahasiswa)
129. Yuliani Salsabila
130. Firda Amelia Malik
131. Sateja Unggul Wicaksana P
132. Amry Al Mursalaat
133. Alita Karen
134. Ade Taufikurrachman
135. Adi Dharma
136. Afriadi Aminuddin
137. Ahmad Dwiki Pradany
138. Ahmad Fedullah
139. Ahmad Lukman Fahmi
140. Ahmad Rofiq
141. Ahmad SM
142. Ahmad Sulthon
143. Ahsan Hamidi
144. Ahyatuddin, S.Pd.

145. Ajat S. Hasan
146. Ajeng Namyra Putri
147. Akhmad Rifai
148. Alan Fauzi
149. Asnaeni
150. Bachtij Trijono
151. Barry Mikhael Cavin
152. Bastian
153. Bayu Kusumo
154. Binarso Hariadi
155. Bona Utama Siringoringo
156. Bramz
157. Budi Darmawan
158. Budiyana Saifullah
159. Carlen Anargya Radiany
160. Cendhy Vicky Vigana
161. Corneles Huwae
162. Dede Tirtayasa
163. Demak Mutiara Siagian
164. Denny H
165. Dicky Kurniawan
166. Dr. Firman Tobing
167. Dr. Ikhsan Gunadi
168. Dwi Yanti Putri
169. Dyah
170. Endi Bima Aditya
171. Endro Sulistianto
172. Ervan Bahrian
173. Faatun
174. Firziana Roosnaleli
175. Fitrah Piga
176. Frans Manuhutu
177. Fransiskus Alfendi Ance
178. G. Gandawijaya
179. Gafri David.MD.
180. Gama Loka
181. Gasmara Tisnawinata
182. Gito Waluyo
183. Hairoel Soenardi
184. Hamdan Budiman
185. Hamzah
186. Harfan
187. Haryanto
188. Hayin Mawalia Khodijah
189. Hendra Gunawan Putra
190. Hendra Prangin
191. Heven Karisoh
192. Husin

193. I Made Ardana
194. I Nyoman Susila
195. Ihsan
196. Ikhlaul Amal
197. Ilham Tahta Amrillah
198. Ilham Yafiz
199. Iman Sudibyo
200. Imas Nurhayati
201. Ina Irawati
202. Indri Sri Sembadra
203. Irgi Giovano
204. Irwandi
205. Irwanto
206. Iskandar
207. Jekson
208. Jimbon
209. Jull Takaliuang
210. Jumadi Asnawi
211. Lalu Mun. Tolkhah Mujtahiddin
212. Longgam Purba
213. M. Halomoan Lubis
214. M. Nuraqi
215. Mahmudin
216. Maria Wungubelen
217. Mas Iwan
218. Max Tulandi
219. Merhansyah
220. Metana
221. Meydi Dwi Stiawan
222. Michael Alexander
223. Miftahul Anwar
224. Muhamad Akib
225. Muhamad Arif Hadiwinata
226. Muhammad Imadudin Nasution
227. Muhammad Susilo
228. Muliadi Siboro
229. Nina
230. Oktavian Widodo
231. Pamudji Widodo
232. Panusunan Quirino Harahap
233. Prima Dirgantara
234. Revico
235. Rini Dyah
236. Rinto Leonardo S.
237. Rinto Rambe
238. Ririn Sefsani
239. Rizal Lubis
240. Roni Sumbayak

241. Rusmawadi Bintoro
242. Rya Elita Br. Sembiring
243. Safirul Islam
244. Saleh Abdullah
245. Setiayana Adi Boreel
246. Siswoyo
247. Slamet Riyanto
248. Slamet Wiyono
249. Sonny S.
250. Sri Nasti Rukmawati
251. Sri Suharso
252. Sudiharisman
253. Susthanto
254. Syafaat
255. Syarifudin
256. Taruna W.
257. Testriono
258. Tharsya
259. Titus Ruban
260. Toyo
261. Uchikowati
262. Veronica Purwaningsih
263. Wahyu
264. Wanto Menda
265. Widodo
266. Wijanto Dharma
267. Winanto
268. Winda
269. Wiwin Siti Aminah R.
270. Yati Maulana
271. Yogi P.
272. Yohannes Pangkerego
273. Yusuf Albana
274. Zaim Rofiqi